

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan pengungsi adalah isu kemanusiaan yang menjadi perhatian internasional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), tercatat bahwa setidaknya terdapat 91 juta jiwa yang berstatus sebagai pengungsi di bawah pengawasan UNHCR per 31 Desember 2020. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana terdapat 86,5 juta pengungsi pada tahun 2019.<sup>1</sup> Lonjakan pengungsi yang kian bertambah setiap tahunnya, disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya lonjakan pengungsi adalah konflik.<sup>2</sup> Menurut Alex Braithwaite, arus pengungsi yang keluar dari negara konflik merupakan bencana kemanusiaan, yang berimplikasi pada ekonomi, demografi, politik, dan keamanan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa tidak aman yang mendorong penduduk untuk meninggalkan kawasannya.<sup>3</sup>

Konflik di Suriah adalah salah satu fenomena penghasil pengungsi terbanyak di dunia, dengan jumlah yang mencapai 6,8 juta jiwa per Juli 2022.<sup>4</sup> Pengungsi Suriah menyumbang 42% dari total keseluruhan pengungsi secara global.<sup>5</sup> Berdasarkan laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2014, masuknya pengungsi Suriah dalam jumlah besar ke negara lain

---

<sup>1</sup> United Nations General Assembly, *Report of the United Nations High Commissioner for Refugees*, vol. 12 (New York, 2021).

<sup>2</sup> Jane Freedman, "Grand Challenges: Refugees and Conflict," *Frontiers in Human Dynamics* 1, no. 1 (2019): 1–3.

<sup>3</sup> Alex Braithwaite, Idean Salehyan, dan Burcu Savun, "Refugees, Forced Migration, and Conflict: Introduction to the Special Issue," *Journal of Peace Research* 56, no. 1 (2019): 5–11.

<sup>4</sup> *Syria Refugee Crisis Explained, USA for UNHCR: The UN Refugee Agency*, 2022.

<sup>5</sup> *UNHCR Projected Global Resettlement Needs, 27th Annual Tripartite Consultations on Resettlement*, 2020.

telah mengubah komposisi demografis dan melemahkan layanan sosial dasar seperti air, sanitasi, makanan, perawatan kesehatan, perumahan, dan listrik.<sup>6</sup> Eropa adalah salah satu kawasan yang mengalami persoalan demikian, karena jumlah pengungsi Suriah yang diterima kawasan tersebut mencapai 1 juta jiwa saat eskalasi konflik terjadi pada tahun 2014.<sup>7</sup>

Seperti banyak negara Eropa lainnya, Denmark juga mengalami peningkatan drastis dalam jumlah pengungsi saat Eropa tengah berhadapan dengan lonjakan pengungsi Suriah. Berdasarkan data oleh *Udlændinge- og Integrationsministeriet* (UIM), terjadi peningkatan dalam permohonan suaka yang diterima Denmark dari tahun 2013 hingga 2015, yaitu dari 7.557 menjadi 21.316 permohonan suaka.<sup>8</sup> Jumlah ini adalah yang terbesar dalam sejarah Denmark, tak heran jika hanya 10.849 di antaranya yang diberikan izin tinggal. Krisis ini secara tidak langsung mendorong Denmark untuk melakukan transformasi kebijakan imigrasi. Hal ini bermula ketika Parlemen Denmark mengeluarkan kerangka amandemen baru dalam *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 72)*. Instrumen ini bertujuan untuk membatasi status suaka yang diberikan kepada pengungsi, dan secara implisit ditujukan untuk pengungsi asal Suriah.<sup>9</sup>

Kerangka ini dibacakan oleh Mette Frederiksen pada 19 September 2014, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Denmark. Kerangka tersebut lantas mengundang banyak kritik dari berbagai pihak. Bahkan, organisasi *think tank* dan penggerak HAM ternama di Eropa sampai mengeluarkan maklumat yang

---

<sup>6</sup> United Nations Development Programme, *A Resilience-Based Development Response to the Syria Crisis*, 2014.

<sup>7</sup> Madiha Nawaz dan Nimra Irfan, "Syrian Civil War in the Context of Conflict Resolution (Mediation Efforts)," *Pakistan Journal of International Affairs* 4, no. 1 (2021).

<sup>8</sup> Henrik Thomassen, *The Integration of Refugees in Denmark*, Agustus (Luksemburg, 2019).

<sup>9</sup> Nikolas Feith Tan, "The End of Protection: The Danish 'Paradigm Shift' and the Law of Cessation," *Nordic Journal of International Law (Forthcoming)* (2021): 1–28.

menyatakan bahwa rencana tersebut sangat bertentangan dengan *The European Convention on Human Rights* (ECHR). Maklumat tersebut ditandatangani oleh *Euro-Mediterranean Human Rights Network*, *The Women's Council in Denmark*, dan *Dignity – Danish Institute against Torture*.<sup>10</sup> Kendati demikian, Frederiksen tetap bersikeras untuk menjalankan rencana tersebut dengan mengajukan diri sebagai penanggung jawab (*lederen*) pada Desember 2014, untuk mewujudkan regulasi yang tertera dalam kerangka tersebut.<sup>11</sup> Sejak saat itu, Frederiksen secara aktif menunjukkan dorongannya pada Parlemen Denmark untuk menerapkan pendekatan yang lebih restriktif kepada pengungsi. Alhasil, Denmark menghentikan operasi penerimaan pengungsi yang sebenarnya adalah mandat dari PBB.<sup>12</sup> Frederiksen menjelaskan bahwa, meskipun pemerintah berusaha untuk menghormati kewajiban internasional, nyatanya Denmark tidak memiliki kapasitas untuk menawarkan perlindungan kepada semua pengungsi yang membutuhkan.<sup>13</sup>

Transformasi kebijakan imigrasi Denmark semakin kuat digaungkan sejak Frederiksen memenangkan pemilu pada 27 Juni 2019.<sup>14</sup> Perdana Menteri yang berasal dari partai *Socialdemokratiet* tersebut kemudian memperkenalkan visi *Zero Asylum Seekers* untuk mewujudkan Denmark yang bersih dari pengungsi dan

---

<sup>10</sup> “Denmark: Call to Reject Bill Increasing Refugees’ Vulnerability,” *Euro-Mediterranean Human Rights Network*, diakses pada 28 September 2022, <https://euromedrights.org/publication/denmark-call-to-reject-bill-increasing-refugees-vulnerability/>.

<sup>11</sup> Malene H. Jacobsen, “Precarious (Dis)Placement: Temporality and the Legal Rewriting of Refugee Protection in Denmark,” *Annals of the American Association of Geographers* 112, no. 3 (2022): 819–827.

<sup>12</sup> Sune Haugbolle, *Did the Left Really Win in Denmark?*, 2019.

<sup>13</sup> *Socialdemokratiet, A Fair Direction for Denmark*, 2019.

<sup>14</sup> Karina Kosiara-Pedersen, “Denmark: Political Developments and Data in 2021,” *European Journal of Political Research Political Data Yearbook* 1, no. 1 (2022): 1–10.

pencari suaka.<sup>15</sup> Frederiksen berdalih bahwa Denmark seharusnya melakukan repatriasi pengungsi non-Barat ke pusat penampungan pengungsi di Afrika Utara dan Timur Tengah.<sup>16</sup>

Visi ini mendapat berbagai kecaman dari banyak pihak. UNHCR menyatakan kekecewaannya terhadap Denmark, hal ini disampaikan oleh juru bicara Shabia Mantoo. Disampaikan bahwa langkah tersebut telah merusak prinsip dan norma perlindungan pengungsi internasional. Pihak domestik pun juga turut melayangkan tegurannya, hal ini disampaikan oleh *Dansk Flygtningehjælp*, yang diwakili oleh Sekretaris Charlotte Slente. Dinyatakan bahwa gagasan untuk menepis dan mengirim balik pengungsi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi.<sup>17</sup> Niels-Erik Hansen, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam masalah pengungsi, juga menyatakan kekecewaannya terhadap putusan yang didorong Frederiksen ini. Beliau menggagaskan bahwa Denmark adalah tempat terburuk di Eropa sekaligus satu-satunya negara di kawasan tersebut yang menolak merangkul beban pengungsi.<sup>18</sup>

Input yang masuk sama sekali tidak memengaruhi Frederiksen untuk mewujudkan visinya. Alhasil, pada 3 Juni 2021, Parlemen Denmark menuangkan visi tersebut menjadi kebijakan yang memungkinkan Denmark mendirikan pusat penerimaan suaka di luar Eropa, yang kemudian dituangkan dalam *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 226)*. Kebijakan ini juga mengatur bahwa pencari suaka

---

<sup>15</sup> Zuhail Karakoç Dora dan Zahide Erdoğan, "The Defeat of Multiculturalism over Nationalism and Religion: Transformation of Immigration Policies in Denmark and Sweden," *Hitit İlahiyat Dergisi/Hitit Theology Journal* 20, no. 2 (2021): 517–546.

<sup>16</sup> Marion MacGregor, "Denmark Aims for Zero Asylum Seekers," *Info Migrants*, 2021, diakses pada 22 September 2022. <https://www.infomigrants.net/en/post/29842/>.

<sup>17</sup> Rachael Kennedy, "Why Is Denmark Under Fire Over A New Law to Send Its Asylum Seekers Abroad?," *Euro News*.

<sup>18</sup> "Danish Plan to Repatriate Syrian Refugees Sparks Controversy," *Al Jazeera Media Network*, 2021, diakses pada 23 September 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/12/danish-plan-to-repatriate-syrian-refugees-sparks-controversy>.



yang tiba di Denmark akan diterbangkan ke negara lain.<sup>19</sup> *European Commission* lantas mengeluarkan prakarsa yang menyatakan Denmark telah melanggar aturan suaka yang berlaku di Uni Eropa, dan Denmark sewaktu-waktu bisa ditindak secara hukum jika hal ini memang terealisasikan.<sup>20</sup> Peringatan dari *European Commission* pun tak dapat melunturkan niat Frederiksen untuk mewujudkan visi *Zero Asylum Seekers* di Denmark. Hal ini dibuktikan dengan penggarapan tahap selanjutnya dari kebijakan tadi, di mana Denmark menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rwanda yang menyatakan bahwa kedua negara ini akan menjajaki pembentukan program mengenai pencari suaka.<sup>21</sup> Rencana program ini adalah untuk repatriasi pencari suaka yang tiba di Denmark ke Rwanda. Hal ini dipresentasikan oleh perwakilan parlemen Denmark, yaitu Kaare Dybvad Bek dan Flemming Møller Mortensen pada 9 September 2021.<sup>22</sup>

Mengikuti uraian di atas, dapat terproyeksikan betapa gigihnya Frederiksen dalam mentransformasikan kebijakan imigrasi Denmark. Berbagai input yang dilayangkan untuk setiap kemajuan dalam mewujudkan visi *Zero Asylum Seekers*, nyatanya tidak meruntuhkan niat Frederiksen dalam merealisasikan rencananya. Peringatan penjatuhan sanksi terhadap negara pun tak menggoyahkan pendiriannya. Hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi tersebut.

---

<sup>19</sup> Nikolas Feith Tan, "Visions of the Realistic? Denmark's Legal Basis for Extraterritorial Asylum," *Nordic Journal of International Law (Forthcoming)* (2021): 1–8.

<sup>20</sup> "Denmark Closer to Sending Asylum Seekers to Rwanda," *Info Migrants*.

<sup>21</sup> Oswald T. Brown, "Denmark to Open Office in Rwanda Addressing Refugee Challenges," *The Washington Informer*, 2022, diakses pada 27 September 2022, <https://www.washingtoninformer.com/denmark-to-open-office-in-rwanda-addressing-refugee-challenges/>.

<sup>22</sup> Victor Wong, "Denmark & Rwanda Sign Declaration on Possible Transfer of Asylum Seekers," *Schengen Visa*, 2022, diakses pada 27 September 2022, <https://www.schengenvisainfo.com/news/denmark-rwanda-sign-declaration-on-possible-transfer-of-asylum-seekers/>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Denmark adalah negara pertama yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tepatnya pada 4 Desember 1952. Hal ini mengindikasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh negara Skandinavia tersebut. Namun, sejak lonjakan pengungsi Suriah memasuki Eropa pada tahun 2013 hingga 2015, Denmark mulai mentransformasikan kebijakan imigrasinya ke arah yang lebih restriktif. Hal ini bermula saat dirilisnya kerangka amandemen baru, yang tertuang dalam *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 72)*. Sejak saat itu, sosok Mette Frederiksen kerap menunjukkan sentralitasnya untuk merealisasikan kerangka amandemen tersebut. Frederiksen menjadi semakin intens saat ia terpilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 2019. Bahkan, Frederiksen menggaungkan visi *Zero Asylum Seekers* guna mempromosikan rencana tersebut. Langkah ini menimbulkan tanggapan negatif dari berbagai pihak, namun hal ini tidak mengurungkan niat Frederiksen dan parlemennya. Diabaikannya seluruh input ini mengisyaratkan adanya prospek tersendiri oleh Frederiksen dalam menuntaskan persoalan pengungsi di Denmark. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan guna melihat gaya kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark, sehingga persoalan ini sangat menarik untuk diteliti.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi pada rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat diteliti adalah “Bagaimana gaya

kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark melalui visi *Zero Asylum Seekers*?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan gaya kepemimpinan Mette Frederiksen selaku aktor kunci dalam kebijakan repatriasi pengungsi Suriah di Denmark melalui visi *Zero Asylum Seekers* yang diprakarsainya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur rujukan dalam kajian hubungan internasional, terkhusus dalam lingkup pengaruh individu terhadap perumusan kebijakan luar negeri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran analitis mengenai gaya kepemimpinan individu dalam perumusan kebijakan luar negeri.

#### **1.6 Studi Pustaka**

Dalam melakukan riset untuk memecahkan anomali yang bernaung di penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data ini tentu berguna sebagai pijakan bagi peneliti untuk melancarkan penelitian ini. Peneliti telah menghimpun serangkaian karya tulis ilmiah yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan dalam

penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti jadikan acuan utama adalah sebagai berikut:

Pertama, peneliti merujuk pada artikel jurnal berjudul “*Precarious (Dis)Placement: Temporality and the Legal Rewriting of Refugee Protection in Denmark*”, yang ditulis oleh Malene H. Jacobsen dalam jurnal *Annals of the American Association of Geographers*.<sup>23</sup> Artikel ini membahas rekonfigurasi hukum perlindungan pengungsi di Eropa dan Denmark, serta konsekuensinya bagi negara. Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2022 tersebut menitikberatkan kajiannya pada dampak krisis pengungsi Eropa tahun 2014-2015 terhadap kebijakan imigrasi di negara-negara kawasan tersebut. Dijelaskan bahwa Denmark adalah salah satu negara Eropa yang bertransformasi secara cukup drastis dalam kebijakan imigrasinya. Jacobsen menyebutkan bahwa serangkaian langkah keimigrasian yang diputuskan oleh Denmark, ditargetkan untuk pengungsi asal Suriah. Para pengungsi asal Suriah pada umumnya diberikan izin tinggal sementara selama satu tahun. Dalam masa ini, para pengungsi dapat mengakses layanan sosial, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Namun, pada Februari 2019, parlemen Denmark merencanakan repatriasi pengungsi Suriah kembali ke negaranya, dengan alasan bahwa Damaskus sudah aman.

Artikel ini kemudian menganalisis kebijakan yang terdapat dalam *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 72)*, yang membahas pembatasan status suaka di Denmark. Keterlibatan instrumen seperti siaran pers, dokumen legislatif, debat parlemen, kasus pengadilan nasional dan internasional, dan laporan negara, merupakan sumber-sumber perumusan kebijakan luar negeri Denmark yang

---

<sup>23</sup> Malene H. Jacobsen, “Precarious (Dis)Placement: Temporality and the Legal Rewriting of Refugee Protection in Denmark,” *Annals of the American Association of Geographers* 112, no. 3 (2022): 819–827.



dijelaskan oleh Jacobsen. Negara-negara Eropa telah lama berupaya untuk mencegah pengungsi yang lari dari wilayah konflik mencapai wilayah kedaulatan negaranya, dan Denmark adalah negara terdepan dalam mewujudkan langkah tersebut. Artikel ini menjelaskan Denmark sebagai negara yang mempunyai proliferasi kontrol perbatasan dan penegakan imigrasi terketat di Eropa. Artikel ini memberikan sumbangsih yang cukup signifikan pada penelitian peneliti. Kajian dalam artikel ini membantu peneliti dalam menggambarkan praktik kebijakan imigrasi Denmark, terutama dalam menanggapi pengungsi asal Suriah. Namun, terdapat perbedaan yang kentara antara artikel Jacobsen dengan penelitian peneliti, yaitu mengenai level analisis yang ditetapkan. Jacobsen mencoba menganalisis artikelnya melalui sudut pandang Denmark sebagai sebuah negara, sedangkan peneliti menetapkan Mette Frederiksen sebagai seorang pemimpin sekaligus individu sebagai akar dari penelitian ini.

Literatur kedua adalah artikel jurnal berjudul “*Political Institutions and Their Role in the Foreign Policy of Denmark*” yang ditulis oleh Lizaveta A. Dubinka-Hushcha, seorang peneliti asal Rusia.<sup>24</sup> Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal *Вестник СПбГУ (Vestnik of Saint Petersburg University)* untuk konsentrasi *История (History atau Sejarah)*. Artikel yang dirilis pada tahun 2022 ini berfokus pada sejarah perkembangan institusi politik di Denmark setelah Perang Dunia II dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Artikel ini menjelaskan bahwa aspek sejarah juga beriringan dengan *status quo* Denmark. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kekuatan Parlemen Denmark (*Folketing*) atas aspek-aspek tertentu dalam kebijakan luar negeri.

---

<sup>24</sup> Lizaveta A. Dubinka-Hushcha, “Political Institutions and Their Role in the Foreign Policy of Denmark,” *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istoriya* 67, no. 1 (2022): 174–189.

Dubinka-Hushcha menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Denmark berpatokan pada stabilitas sosial-politik, tingkat pembangunan ekonomi, diplomasi multilateral, dan dorongan pemimpin. Formulasi pengambilan keputusan seperti ini telah membawa Denmark mencapai keberhasilan dalam mempromosikan kepentingan nasionalnya. Meskipun perumusan kebijakan luar negeri adalah kewenangan pemerintah, nyatanya interaksi antar berbagai aktor memiliki peranan masing-masing dalam praktik proses perumusan suatu kebijakan.

Namun, dari sekian banyak aktor dan aspek yang dibahas dalam artikel ini, peneliti lebih banyak menuai informasi mengenai peran seorang pemimpin dalam formulasi kebijakan luar negeri Denmark, karena memiliki signifikansi yang akurat untuk penelitian ini. Dubinka-Hushcha menjelaskan bahwa pemimpin di Denmark berperan dalam menjamin stabilitas dan kontinuitas negara, guna menjaga citra positif Denmark secara global. Para pemimpin Denmark juga dijelaskan memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh khusus pada kebijakan luar negeri, melalui komite parlemen khusus. Meskipun berkontribusi pada bagian penting penelitian ini, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara artikel ini dengan penelitian yang peneliti garap. Perbedaan tersebut adalah mengenai cakupan penelitian dari masing-masing tulisan. Peneliti mencoba menguraikan langkah Denmark dalam satu kebijakan luar negeri yang spesifik, yaitu kebijakan keimigrasian, dan menganalisis gaya kepemimpinan Mette Frederiksen sebagai seorang pemimpin dalam perumusan kebijakan terkait. Sedangkan artikel Dubinka-Hushcha memiliki cakupan penelitian yang tidak terbatas pada satu atau sejumlah kebijakan saja, melainkan seluruh kebijakan Denmark secara umum.

Ketiga, peneliti merujuk pada artikel jurnal berjudul “*The Defeat of Multiculturalism Over Nationalism and Religion: Transformation of Immigration Policies in Denmark and Sweden*”. Artikel ini dipublikasikan melalui himpunan jurnal bernama *Hitit İlahiyat Dergisi*, yang berasal dari Turki. Artikel ini memulai kajiannya dengan memaparkan beberapa momentum yang berujung pada krisis pengungsi, di antaranya migrasi tenaga kerja pada 1960-an, krisis pengungsi yang melarikan diri dari Yugoslavia pada 1990-an, dan krisis pengungsi Eropa di tahun 2015.<sup>25</sup> Artikel yang ditulis oleh Zuhail Karakoç Dora dan Zahide Erdoğan ini berusaha menjelaskan bagaimana krisis pengungsi yang terjadi di Eropa tahun 2015 telah mengubah struktur populasi kawasan tersebut. Sejak krisis pengungsi tersebut bermula, aspek keamanan Eropa mulai menilik pada pendekatan yang mempertimbangkan ekonomi dan manajemen keimigrasian. Artikel ini juga menjelaskan bahwa krisis pengungsi 2015 tidak hanya menjadi krisis keamanan perbatasan, tetapi juga menjadi titik yang membuyarkan identitas negara-negara Eropa, serta momen yang meninjau sejauh mana upaya negara-negara Eropa bertindak untuk melestarikan kesejahteraan.

Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2021 ini, menitikberatkan pembahasan utamanya pada pengaruh yang ditimbulkan agama, nasionalisme, dan kekhawatiran ekonomi terhadap transformasi kebijakan imigrasi setelah tahun 2015 di Denmark, yang menerapkan kebijakan restriktif ekstrem yang digaungkan melalui visi bernama *Zero Asylum Seekers*. Artikel ini juga menyebutkan bahwa kebijakan Denmark dalam pengurangan bantuan kemanusiaan dan agenda untuk menepis pengungsi pasca krisis tahun 2015, ditetapkan dengan tujuan untuk

---

<sup>25</sup> Zuhail Karakoç Dora and Zahide Erdoğan, “The Defeat of Multiculturalism over Nationalism and Religion: Transformation of Immigration Policies in Denmark and Sweden,” *Hitit İlahiyat Dergisi/Hitit Theology Journal* 20, no. 2 (2021): 517–546.

melindungi kesejahteraan negara dan masyarakat. Selain itu, langkah yang diambil Denmark ini juga disebutkan sebagai hasil dari buah pemikiran Perdana Menteri Mette Frederiksen yang mulai menjabat sejak 27 Juni 2019. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana manajemen keimigrasian Denmark yang kontroversi tersebut muncul dengan tujuan mengontrol migrasi tenaga kerja, serta dengan motif melindungi keamanan nasional.

Dora dan Erdoğan juga menyinggung tentang rumus yang digunakan Denmark dalam menyusun kebijakan terkait pengungsi dan keimigrasian, di antara lain yaitu preferensi budaya mayoritas, pencegahan kekerasan, dan privatisasi. Signifikansi karya tulis ini dengan penelitian peneliti terletak pada gagasan mengenai motif dan alasan Denmark dalam mempertimbangkan kebijakan pengungsi dan keimigrasian, khususnya kebijakan yang lahir dari visi *Zero Asylum Seekers*. Terdapat perbedaan yang cukup kentara antara artikel ini dengan penelitian peneliti. Hal ini terletak pada unit eksplanasi dari masing-masing tulisan. Dora dan Erdoğan menilik kebijakan pengungsi dan keimigrasian Denmark melalui faktor-faktor seperti budaya dan agama, serta meluaskan masa praktik kebijakan tersebut, dalam artian bahwa tiada momentum khusus yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Sedangkan peneliti mengerucutkan unit eksplanasi penelitian ini pada fenomena kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah.

Sumber rujukan keempat adalah artikel berjudul “*Refugees, Asylum Seekers, and Policy in Europe*”, yang ditulis oleh Timothy J. Hatton dan Jeffrey G. Williamson. Artikel ini membahas tentang penyebab perpindahan pengungsi dan aliran suaka di Eropa, dengan menitikberatkan kepada efek konflik, pergolakan



politik, dan insentif ekonomi untuk bermigrasi.<sup>26</sup> Hatton dan Williamson memaparkan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk bermigrasi dan mencari suaka di negara lain. Perang atau konflik adalah penyebab utama lonjakan pengungsi, kemudian disusul oleh aksi rezim politik yang represif, sehingga mengancam keamanan. Pengungsi juga disebutkan sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia karena kurangnya nilai demokrasi serta hak-hak sipil di suatu daerah. Gagasan ini sangat sesuai dengan penelitian peneliti mengenai lonjakan pengungsi sebagai efek samping konflik Suriah. Artikel ini juga membahas tentang perkembangan kebijakan suaka di Uni Eropa. Dasar fundamental untuk kebijakan suaka di Uni Eropa adalah Konvensi Pengungsi 1951. Kendati demikian, negara-negara di Eropa juga mempunyai caranya masing-masing dalam menetapkan kebijakan terkait.

Berbagai elemen kebijakan melibatkan tingkat koordinasi yang berbeda antar negara. Langkah-langkah ini kemudian ditujukan untuk memperketat kontrol perbatasan, yang diadopsi dan disesuaikan berdasarkan Konvensi Schengen tahun 1990 dan Perjanjian Maastricht yang mulai dijalankan pada tahun 1993. Artikel ini dinilai sangat layak untuk dijadikan salah satu referensi utama dalam penelitian ini, karena posisi Denmark yang seringkali bersinggungan dengan persoalan pencari suaka dan pengungsi, serta kaitannya dengan efek dari sebuah konflik, yang dalam kasus ini adalah konflik Suriah. Selain itu, artikel ini juga berfokus pada evolusi kebijakan yang dikeluarkan negara-negara Eropa terkait pencari suaka dan pengungsi, serta bagaimana efek yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Hal ini secara jelas menunjukkan signifikansi dengan

---

<sup>26</sup> Timothy J. Hatton and Jeffrey G Williamson, "Refugees, Asylum Seekers, and Policy in Europe," *The Institute for the Study of Labor (IZA)* (2004).

penelitian yang peneliti susun, yang mana Denmark juga kerap merevisi kebijakan-kebijakan luar negerinya yang membahas tentang pencari suaka dan pengungsi, sampai akhirnya menetapkan kebijakan *Danish Aliens Act (Lovforslag nr. L 72)*.

Literatur kelima adalah sebuah artikel jurnal berjudul “*The Importance of Windows of Opportunity for Foreign Policy Change*” yang merupakan bagian dari jurnal *International Area Studies Review*.<sup>27</sup> Artikel ini membahas tentang bagaimana dominasi seorang pemimpin dapat memainkan peran penting yang menentukan perumusan dan perubahan dalam kebijakan luar negeri, melalui studi kasus di dua negara berbeda, yaitu Denmark dan Australia. Untuk memperoleh informasi secara lebih efisien, peneliti hanya berfokus pada studi kasus Denmark yang dianalisis dalam artikel ini, karena memang cukup relevan dengan penelitian peneliti yang juga menjadikan Denmark sebagai objek kajian. Artikel yang ditulis oleh Fredrik Doeser dan Joakim Eidenfalk ini, mencoba memaparkan bagaimana Uffe Ellemann-Jensen, Menteri Luar Negeri Denmark untuk periode 1982 hingga 1983, menjadi aktor penting dalam kebijakan luar negeri Denmark dalam fenomena pemberian sanksi blokade laut oleh PBB kepada Irak pada 25 Agustus 1990. Doeser dan Eidenfalk menyebutkan bahwa Denmark bukanlah negara yang aktif berpartisipasi dalam NATO, selama Perang Dingin, karena Denmark seringkali memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pakta tersebut.

Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2013 ini kemudian menjelaskan bagaimana Ellemann-Jensen membawa Denmark menjadi negara yang proaktif

---

<sup>27</sup> Fredrik Doeser and Joakim Eidenfalk, “The Importance of Windows of Opportunity for Foreign Policy Change,” *International Area Studies Review* 16, no. 4 (2013): 390–406.

dalam agenda NATO. Hal ini tampak jelas ketika Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi blokade laut kepada Irak, sebagai respons atas invasi yang dilancarkan Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Hal ini sonyak membuat Ellemann-Jensen mendorong parlemen agar mengirimkan pasukan militer guna berpartisipasi dalam blokade laut tersebut. Pada awalnya, rencana ini tidak digubris dengan serius oleh parlemen, termasuk Perdana Menteri Poul Schlüter. Namun, Ellemann-Jensen kembali meyakinkan parlemen bahwa invasi Irak ke Kuwait adalah salah satu ancaman yang berada di luar perbatasan Eropa, tetapi bisa saja berimbas pada kawasan jika tidak ditindaklanjuti secara bersama. Menteri Luar Negeri Denmark tersebut juga mempertanyakan, sejauh mana Eropa akan terus mengandalkan kesediaan Amerika Serikat untuk memecahkan masalah keamanan yang sewaktu-waktu bisa mengancam Eropa. Alhasil, parlemen sepakat untuk mengirimkan korvet *Olfert Fischer* ke Teluk Persia, tempat invasi Irak berlangsung.

Artikel ini memberikan kontribusi yang penting pada penelitian ini, karena peneliti dapat melihat bagaimana dominasi seorang individu dapat mendorong Denmark untuk mengeluarkan putusan luar negeri. Selain itu, artikel karya Doeser dan Eidenfalk ini juga membantu peneliti dalam melihat pola kepemimpinan Perdana Menteri Denmark, dan bagaimana Parlemen Denmark (*Folketing*) berunding dan mempertimbangkan berbagai aspek dan input dalam perumusan kebijakan luar negeri Denmark. Meskipun artikel ini memberikan kontribusi krusial pada penelitian peneliti, terdapat berbagai perbedaan yang jelas dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Doeser dan Eidenfalk mencoba menjelaskan dominasi seorang pemimpin Denmark yang sudah lama pensiun dari jabatannya,

sedangkan peneliti mencoba memahami dominasi dan gaya kepemimpinan seorang Perdana Menteri yang masih menjabat di parlemen. Selain itu, dominasi yang dijelaskan dalam artikel ini cenderung berfokus pada isu keamanan, yaitu invasi Irak ke Kuwait, sedangkan fokus kajian yang peneliti bawa dalam penelitian ini adalah persoalan pengungsi, sehingga terdapat banyak sekali ruang kosong yang dapat peneliti gunakan untuk menunjukkan kebaruan-kebaruan dalam konteks serupa.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 *Predominant Leader***

Dalam dinamika sebuah negara, terdapat banyak sekali aktor yang memiliki perannya masing-masing. Para aktor ini memiliki tugas dan komposisi peran yang berbeda-beda pula. Namun, dari sekian banyak aktor yang berkecimpung dalam dinamika tersebut, pemimpin merupakan aktor sentral karena ia adalah sosok yang memegang kendali atas banyak hal. Meskipun suatu aksi atau putusan negara telah dipengaruhi oleh berbagai aspek, sejatinya pemimpin memainkan peran yang mendominasi serangkaian proses tersebut.

Dalam penelitian yang peneliti kembangkan, terlihat jelas bagaimana Mette Frederiksen memainkan peran dalam hal ini, dan dapat diklasifikasikan sebagai *Predominant Leader*. Untuk itu, peneliti akan menguraikan konsep ini secara lebih mendalam menggunakan rancangan yang dikemukakan oleh Hermann, dkk. dalam tulisannya, yaitu “*Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals*”. Dalam tulisan ini, disebutkan bahwa gaya kepemimpinan (*leadership style*) menjadi fokus perhatian untuk memahami dominasi dari



seorang pemimpin.<sup>28</sup> Hal ini serupa dengan pemikiran Juliet Kaarbo dalam “*Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision-Making: A Framework for Research*”. Kaarbo menjelaskan bahwa dominasi seorang pemimpin dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya, yang mencakup bagaimana ia berhubungan dengan pihak-pihak di sekitarnya, caranya menerima informasi, dan bagaimana ia mengambil sebuah putusan.<sup>29</sup>

Hermann, dkk. kemudian menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan secara umum, yang diadaptasinya dari tulisan Mark Snyder dengan judul “*Public Appearances, Private Realities: The Psychology of Self Monitoring*”. Gaya kepemimpinan tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Goal-Driven*

Pemimpin yang *goal-driven* dijelaskan sebagai sosok yang berorientasi pada tugasnya, dan menafsirkan keadaan sekitarnya melalui sudut pandang yang terkonstruksi oleh keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), motif (*motives*), dan semangat (*passions*). Pemimpin yang *goal-driven* mengedepankan prioritas negara dalam perumusan kebijakan luar negeri. Prioritas di sini merujuk pada langkah pemimpin tersebut dalam menafsirkan hal-hal yang penting dalam kebijakan luar negeri. Pemimpin yang *goal-driven* juga dimotivasi oleh tujuannya dalam mengerahkan berbagai cara agar proses perumusan kebijakan luar negeri sepenuhnya berada di bawah arahnya.

---

<sup>28</sup> Margaret G. Hermann, dkk., “Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals,” *International Studies Association* (2001): 83–131.

<sup>29</sup> Juliet Kaarbo dan Margaret G. Hermann, “Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual Differences Affect the Foreign Policymaking Process,” *Leadership Quarterly* 9, no. 3 (1998): 243–263.

## 2. *Situationally Responsive*

Pemimpin dengan gaya kepemimpinan *situationally responsive* merupakan jenis pemimpin yang cenderung lebih fleksibel dan berpikiran terbuka. Pemimpin *situationally responsive* percaya bahwa dalam dinamika politik negara, terdapat banyak sekali peran yang dapat dimainkan oleh individu yang berbeda. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini berupaya untuk menyesuaikan (*adjusting*) perilakunya dengan tuntutan situasi. Dalam perihal perumusan kebijakan luar negeri, pemimpin yang *situationally responsive* akan memastikan posisi aktor-aktor yang terlibat sesuai porsi pekerjaan masing-masing. Citra (*image*) dari pemimpin *situationally responsive* seringkali diukur oleh kepentingan dan harapan aktor lain.

Untuk memproyeksikan dominasi seorang pemimpin, Hermann, dkk. menjelaskan tiga komponen utama yang menjadi parameter dominasi seorang pemimpin dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta menilai sensitivitas pemimpin tersebut dalam konteks politik, yaitu:

### 1. *Reaction to Political Constraints* (Reaksi Terhadap Kendala Politik)

Parameter ini mengacu pada bagaimana kendala domestik dan internasional dapat memengaruhi pemimpin dalam segala tindakan yang diambilnya, tak terkecuali kebijakan luar negeri. Pemimpin memainkan peran penting dalam menegosiasikan kendala politik untuk membangun konsensus bersama anggota parlemen dan pihak-pihak internasional yang memang ada hubungannya dalam penyelesaian kendala politik tersebut. Terdapat berbagai cara bagi pemimpin untuk menjadi aktif dalam

menuntaskan kendala politik. Seorang pemimpin yang dominan bisa saja menggunakan kontrol dan pengaruhnya dalam menuntaskan kendala politik. Bagi pemimpin yang *goal-driven*, kendala politik tidak menghalanginya untuk mencapai tujuan. Keyakinan (*beliefs*), sikap (*attitudes*), motif (*motives*), dan semangat (*passions*) yang dimilikinya akan sangat menggambarkan tanggapannya terhadap suatu fenomena. Sementara itu, pemimpin yang *situationally responsive*, akan membangun konsensus dengan aktor di sekitarnya, sebelum ia mengambil keputusan untuk menuntaskan kendala politik.

2. *Openness to Information* (Keterbukaan pada Informasi/Input)

Parameter ini menjelaskan bagaimana pemimpin menerima dan mengelola informasi yang datang kepadanya, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis untung dan rugi dalam mengambil keputusan. Terdapat dua pendekatan yang seringkali diterapkan pemimpin dalam kaitannya dengan parameter ini. Pertama, pemimpin datang dengan visi atau agenda yang dirumuskan dengan baik, yang mencakup interpretasi data yang sudah diterimanya. Kedua, pemimpin yang mempelajari situasi dan merunutkan informasi terlebih dahulu, sebelum ia mengambil tindakan. Pemimpin yang *goal-driven* cenderung menerapkan pendekatan pertama, yang mana ia akan memaksakan visi dan agenda yang telah disusunnya untuk diterapkan dalam kebijakan luar negeri. Pemimpin yang *goal-driven* cenderung mendorong aktor di sekitarnya untuk menggunakan sudut pandangnya dalam upaya mengelola informasi, hal ini menjadikannya seorang pemimpin yang tertutup dalam menerima

input. Sedangkan pemimpin yang *situationally responsive* lebih terbuka dalam menerima input, sehingga ia akan menelaah informasi yang masuk sebelum mendorong negara mengambil suatu tindakan.

### 3. *Motivation for Action* (Motivasi dalam Bertindak)

Parameter ini mencoba mendeskripsikan apa yang membentuk karakter seorang pemimpin dan apa yang menjadi prioritas pemimpin tersebut, sehingga memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis hal yang membentangkan perbedaan dalam motivasi seorang pemimpin. Pertama, pemimpin yang cenderung memprioritaskan masalah (*problem-focus*). Pemimpin dengan motivasi ini didorong oleh ide dan citra yang ia yakini, yang sekaligus menjadi landasannya untuk memutuskan sebuah perkara. Pemimpin dengan *problem-focus* dinilai kurang sensitif terhadap konteks politik, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Pemimpin dengan motivasi ini menunjukkan mobilisasi dan efektivitas yang menonjol saat ia ingin mewujudkan suatu tujuan. Kedua, pemimpin yang mengedepankan relasi dan reaksi dai aktor lain (*relationship-focus*). Motivasi jenis ini mendorong pemimpin untuk membangun hubungan dengan berbagai aktor, sehingga memunculkan reaksi berupa validasi, dukungan, persetujuan, status, dan penerimaan dari aktor tersebut. Bagi pemimpin dengan motivasi ini, persuasi dan negosiasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuannya.

Setelah menguraikan parameter-parameter yang menjadi tolak ukur dalam menilai dominasi seorang pemimpin, Hermann, dkk. Kemudian merunutkan



delapan gaya kepemimpinan yang dihasilkan atas hubungan timbal-balik dari parameter-parameter tersebut. Informasi ini dimuat dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Gaya Kepemimpinan dalam Fungsinya Atas Reaksi Terhadap Kendala Politik, Keterbukaan pada Informasi/Input, dan Motivasi**

Reaksi Terhadap Kendala Politik	Keterbukaan pada Informasi/Input	Motivasi	
		<i>Problem Focus</i>	<i>Relationship Focus</i>
Menentang Kendala Politik	Tertutup pada Informasi/Input	<b><i>Expansionistic</i></b> (Berfokus pada perluasan kekuatan dan pengaruh)	<b><i>Evangelistic</i></b> (Berfokus dalam persuasi dan melibatkan diri pada tujuan aktor lain)
menjadi pemimpin <i>crusader</i>			
Menentang Kendala Politik	Terbuka pada Informasi/Input	<b><i>Incremental</i></b> (Berfokus untuk mempertahankan kemampuan sembari menghindari hambatan)	<b><i>Charismatic</i></b> (Berfokus pada perwujudan agenda dengan melibatkan aktor lain)
seringkali menjadi pemimpin <i>strategic</i>			
Mencermati Kendala Politik	Tertutup pada Informasi/Input	<b><i>Directive</i></b> (Berfokus pada konsistensi pribadi sembari bekerja dalam norma dan aturan)	<b><i>Consultative</i></b> (Berfokus pada pemantauan terhadap dukungan aktor lain)
cenderung menjadi pemimpin <i>pragmatism</i>			
Mencermati Kendala Politik	Terbuka pada Informasi/Input	<b><i>Reactive</i></b> (Berfokus dalam menilai apa yang mungkin dalam situasi terkini, serta mempertimbangkan apa yang diizinkan konstituen)	<b><i>Accommodative</i></b> (Berfokus dalam menyatukan perbedaan dan membangun konsensus, serta memberdayakan aktor lain untuk berbagi peran dalam sebuah proses)
seringkali menjadi pemimpin <i>opportunistic</i>			

Sumber: *Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals*, 2001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa analisis gaya kepemimpinan tidak berhenti pada tahapan merunutkan komponen-komponen yang menjadi parameter tersebut. Berdasarkan elaborasi mengenai parameter *Reaction to Political Constraints* dan *Openness to Information*, Hermann, dkk. kemudian membentuk empat model gaya kepemimpinan seorang pemimpin, yaitu *crusader*, *strategic*, *pragmatism*, dan *opportunistic*. Pertama, seorang *crusader* merupakan pemimpin yang cenderung tergesa-gesa, karena dalam mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu, ia tidak menunggu hingga saat yang tepat. Pemimpin yang *crusader* yakin bahwa informasi yang dimilikinya cukup untuk mendukung posisinya dalam menetapkan suatu putusan. Pemimpin dengan model ini juga seringkali memiliki kapabilitas untuk memunculkan alasan yang persuasif, sehingga langkah yang diambilnya seolah-olah memiliki kredibilitas dan legitimasi. Kedua, pemimpin yang *strategic* adalah jenis pemimpin yang ahli dalam strategi, karena ia tahu apa yang harus dilakukan, dan informasi seperti apa yang harus dicari untuk mewujudkan tujuannya.

Ketiga, seorang *pragmatism* merupakan pemimpin yang menghormati batasan politik. Maksudnya adalah, pemimpin ini memiliki gagasan dan tujuan yang ingin dibawanya pada parlemen. Namun, di saat yang bersamaan, ia tetap ingin memastikan bahwa gagasan dan tujuan tersebut tidak melewati batas dan porsi pekerjaan aktor-aktor lain. Keempat, seorang *opportunistic*, yang merupakan kebalikan dari pemimpin *crusader*. Pemimpin *opportunistic* adalah model gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap informasi atau input, sekaligus menghormati batasan politik aktor lain. Pemimpin yang *opportunistic* adalah sosok yang memaknai perkara dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang

didorong oleh banyak aktor, karena itulah model pemimpin ini dinilai cukup bijaksana dalam menetapkan sebuah putusan.

Berdasarkan uraian konsep *predominant leader* oleh Hermann, dkk., dapat terlihat jelas bahwasannya seorang pemimpin yang dominan memang memiliki implikasi yang besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hermann, dkk. mencoba meruntukan serangkaian tahapan dan parameter yang membentuk satu kesatuan dalam konsep ini. Oleh sebab itu, peneliti berargumen bahwa konsep ini sangat cocok digunakan untuk membedah anomali dalam penelitian ini.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah serangkaian cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Metodologi penelitian berfungsi untuk menjabarkan gagasan-gagasan seperti mengapa penelitian dilakukan, bagaimana masalah penelitian didefinisikan, dengan cara apa dan mengapa hipotesis dirumuskan, data apa yang dikumpulkan, metode apa yang digunakan, mengapa teknik analisis data tertentu digunakan, dan gagasan lain yang sekiranya berguna untuk memaparkan bagaimana penelitian bisa dilakukan. Pada dasarnya, metodologi penelitian adalah proses yang digunakan seorang peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang hendak diteliti. Kendati demikian, jenis teknik dan metode yang digunakan dalam suatu penelitian, tidak bisa diaplikasikan secara merata untuk seluruh penelitian.<sup>30</sup> Oleh karena itu, seorang peneliti perlu mendesain metodologi untuk penelitiannya sendiri, karena

---

<sup>30</sup> Thuan Nguyen, *Research Methodology: An Introduction*.

harus disesuaikan dengan apa yang hendak diteliti dan hasil seperti apa yang hendak diuraikan.

Menurut Patrick Thaddeus Jackson, dalam studi hubungan internasional, metodologi penelitian mengacu pada sistem dan ide yang koheren, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi melalui struktur penyelidikan yang logis.<sup>31</sup> Menyusun metodologi dalam penelitian hubungan internasional adalah hal yang sangat penting, karena inilah yang akan membatasi agenda penelitian pada lingkup yang spesifik, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih akurat.<sup>32</sup> Selain itu, dorongan untuk menyusun metodologi penelitian hubungan internasional juga dapat membantu peneliti untuk menggambarkan seperangkat asumsi tentang bagaimana dunia sosial dipelajari.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti rancang ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini kaya akan narasi dan analisis yang mendalam. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasari oleh gagasan bahwa metode ini memunculkan lebih banyak detail dan nuansa yang lebih variatif dari sebuah fenomena, daripada yang dapat ditemukan melalui reduksi penelitian kuantitatif.<sup>33</sup> Selain itu, pertimbangan dalam memilih jenis penelitian kualitatif adalah karena objek kajian yang merupakan seorang individu. Menurut Thuan Nguyen, penelitian yang dirancang untuk mengetahui bagaimana perilaku dan pikiran

---

<sup>31</sup> Patrick Thaddeus Jackson, *The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics* (New York: Routledge, 2016).

<sup>32</sup> Christopher Lamont, *Research Method in International Relations* (Los Angeles: SAGE Publications, 2022).

<sup>33</sup> Samuel Barkin, “‘Qualitative’ Methods?,” in *Qualitative Methods in International Relations*, ed. Audie Klotz and Deepa Prakash (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 211–220.



seseorang terhadap suatu hal merupakan penelitian kualitatif.<sup>34</sup> Guna memperoleh hasil penelitian yang matang, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam proses penelitian ini. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mendeskripsikan berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yang kemudian dianalisis secara seksama, sehingga peneliti dapat menguraikan dominasi Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada uraian mengenai gaya kepemimpinan Mette Frederiksen sebagai seorang Perdana Menteri Denmark dalam kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah. Dalam fenomena ini, tentu banyak sekali momentum-momentum yang bisa membantu peneliti memecahkan anomali dalam penelitian ini. Namun, guna menciptakan penelitian yang faktual, struktural, dan tidak mengambang, peneliti menetapkan batasan penelitian ini pada rentang tahun 2013 hingga 2022. Alasan ditetapkannya 2013 sebagai titik awal penelitian ini adalah karena fenomena lonjakan pengungsi Suriah ke Eropa dimulai pada waktu tersebut, yang sekaligus mengawali proses transformasi kebijakan imigrasi Denmark. Kemudian, ditetapkannya 2022 sebagai titik akhir penelitian ini didasari oleh periode kepemimpinan Frederiksen yang masih berlanjut hingga tahun tersebut.

---

<sup>34</sup> Thuan Nguyen, *Research Methodology: An Introduction*.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Serkan Dolma, unit analisis adalah entitas yang dianalisis dalam sebuah penelitian ilmiah. Unit analisis mengacu pada bagian penelitian yang akan menjadi dasar atas hasil dan jawaban penelitian.<sup>35</sup> Jika disederhanakan, unit analisis adalah elemen yang hendak diuraikan secara mendalam dalam sebuah penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan unit analisis di tingkat individu, yaitu Perdana Menteri Denmark sejak tahun 2019, Mette Frederiksen. Prospek yang peneliti teliti dari seorang Mette Frederiksen untuk penelitian ini adalah gaya kepemimpinannya terhadap sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini, unit analisis berperan sebagai variabel dependen, karena unit inilah yang akan dideskripsikan, dieksplorasi, dan diprediksi secara lebih detail. Unit analisis tidak akan berguna jika tidak disandingkan dengan unit eksplanasi. Karena unit eksplanasi merupakan elemen dalam penelitian yang pengaruhnya akan diteliti terhadap unit analisis. Hal ini menjadikan unit eksplanasi sebagai variabel independen, karena kehadirannya memengaruhi variabel dependen.<sup>36</sup> Merujuk pada penelitian ini, unit eksplanasi yang peneliti tetapkan adalah kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah yang ditetapkan Denmark, sebagai salah satu upaya manifestasi visi *Zero Asylum Seekers*. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba menguraikan gaya kepemimpinan yang diberikan Mette Frederiksen dalam proses perumusan kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi di Denmark.

---

<sup>35</sup> Serkan Dolma, "The Central Role of the Unit of Analysis Concept in Research Design," *Istanbul University Journal of the School of Business Administration* 39, no. 1 (2010): 169–174.

<sup>36</sup> Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990).

Suatu level analisis dalam penelitian hubungan internasional dapat ditentukan dengan melihat hubungan dan kedudukan antara unit analisis dan eksplanasi. Mohtar Mas'ood menjelaskan dalam bukunya "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", bahwa terdapat 3 jenis desain analisis dalam hubungan kedua unit tersebut. Pertama, desain induksionis, yaitu saat unit analisis sebuah penelitian berkedudukan lebih rendah dibanding unit eksplanasinya. Kedua, desain korelasional, yaitu kedudukan unit analisis dan unit eksplanasi setara. Ketiga, desain reduksional, yaitu apabila unit analisisnya lebih tinggi daripada unit eksplanasinya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, jenis desain analisisnya adalah induksional. Posisi Mette Frederiksen sebagai unit analisis tentu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah, yang merupakan unit eksplanasi penelitian ini. Sehingga, hubungan yang dapat terlihat dari penelitian ini adalah antara individu dengan negara-bangsa.

Kemudian, terdapat pula level analisis yang tak kalah pentingnya dari elemen-elemen penelitian sebelumnya. Menurut David Singer dalam artikelnya "*The Level of Analysis Problem in International Relations*", level analisis merupakan elemen yang memberikan peneliti deskripsi (*description*), penjelasan (*explanation*), dan prediksi atau praduga (*prediction*) mengenai perilaku suatu hal.<sup>38</sup> Berkaca pada definisi ini, dapat dilihat bahwa level analisis dalam penelitian ini adalah individu, karena sorotan dari penelitian ini terletak pada gaya

---

<sup>37</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990).

<sup>38</sup> J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," *World Politics* 14, no. 1 (1961): 77-92.

kepemimpinan Mette Frederiksen yang kemudian berperan dalam perumusan kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan elemen yang sangat krusial dalam penelitian, tak jarang kesalahan dalam melakukan penelitian disebabkan karena data yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kurangnya nilai ilmiah dalam penelitian tersebut.<sup>39</sup> Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mencoba menghimpun data berjenis sekunder (*secondary data*), dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal, berita, majalah, laporan resmi dari suatu institusi, serta berbagai literatur yang memuat data sekunder lainnya. Untuk uraian secara lebih spesifik, peneliti mengandalkan artikel-artikel yang dihimpun dalam *Nordic Journal of International Law (Forthcoming)*, terutama artikel-artikel yang ditulis oleh Nikolas Feith Tan, karena memuat berbagai data tentang kebijakan imigrasi Denmark, yang berguna sebagai fondasi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peneliti juga mencoba mengumpulkan data dari situs resmi Parlemen Denmark, seperti situs *Statsministeriet (The Prime Minister Office)* yang memuat informasi lengkap tentang aktivitas Perdana Menteri Denmark, yang sangat berguna bagi peneliti untuk menggali sedalam mungkin tentang pola kepemimpinan Mette Frederiksen. Kemudian juga terdapat situs yang menyediakan data statistik Denmark dalam berbagai aspek, yaitu *Danmarks Statistik (Denmark's Statistics)*. Peneliti juga

---

<sup>39</sup> Juliet Corbin dan Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2008).



mengumpulkan data dari berbagai kanal berita internasional. Dalam hal ini, kata kunci yang seringkali peneliti gunakan adalah Denmark, Mette Frederiksen, *asylum seekers*, *refugee*, *zero asylum seekers*, dan *Syrian refugees*. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari tulisan-tulisan Margaret G. Hermann, seorang peneliti hubungan internasional yang berfokus pada kajian di level individu, sehingga berguna bagi peneliti untuk mengembangkan analisis di level serupa.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengembangkan sebuah penelitian, terlebih lagi penelitian kualitatif. Dalam menganalisis data sebuah penelitian, dibutuhkan keselarasan antara teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data.<sup>40</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas data ilmiah dan seluruh proses penelitian. Berkaitan dengan gagasan tersebut, maka diperlukan sebuah penghubung antara teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam hal inilah interpretasi data memainkan perannya. Menurut Uwe Flick dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to Qualitative Research*”, interpretasi data merupakan inti dari penelitian kualitatif. Tahapan ini memerlukan penilaian, analisis, dan penafsiran dari bukti empiris yang telah dibuktikan.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti terapkan diawali dengan proses pengelompokan data sekunder. Setelah itu, peneliti akan menginterpretasikan data tersebut melalui proses operasionalisasi konsep *predominant leader* yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann, dkk.

---

<sup>40</sup> Demola Akinyoade, *Approaches to Data Analysis in Social Research*, 2013.

<sup>41</sup> Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (SAGE Publications, 2002).

Berkaca pada tujuan penelitian ini yang mencoba menjelaskan gaya kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah, maka diperlukan analisis data yang memang dapat menunjukkan gaya kepemimpinan tersebut. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat menilai dominasi yang ia miliki, sehingga elaborasi mengenai hal ini perlu dipaparkan. Dalam kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Hermann, dkk., terdapat tiga komponen utama yang menjadi parameter gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta menilai sensitivitas pemimpin tersebut dalam konteks politik. Parameter ini meliputi *reaction to political constraints* (reaksi terhadap kendala politik), *openness to information* (keterbukaan pada informasi/input), dan *motivation for action* (motivasi dalam bertindak). Melalui elaborasi atas tiga parameter ini, Hermann, dkk. kemudian menjelaskan sejumlah gaya kepemimpinan yang mencirikan seorang pemimpin yang dominan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab I merupakan bagian paling awal dari penelitian ini, yang sekaligus menjadi perkenalan untuk menghantarkan para pembaca kepada pembahasan sesungguhnya dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah, yang berfungsi untuk membentangkan benang merah dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti juga mencantumkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis, studi pustaka yang terdiri atas lima literatur berbeda, dan

kerangka konseptual *predominant leader*. Selanjutnya, peneliti juga menyertakan bab ini dengan metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan rangkaian penelitian pada akhir bab ini, yang dihimpun dalam bagian sistematika penulisan. Keseluruhan bagian dalam bab ini ditujukan untuk memberikan gambaran dasar kepada para pembaca, sehingga dapat memahami permasalahan utama dalam penelitian ini.

## **BAB II Karier Politik Mette Frederiksen**

Bab II merupakan bagian yang menguraikan tentang unit analisis dan aktor utama dalam penelitian ini. Bab ini akan berfokus pada uraian tentang profil dan karier politik seorang Mette Frederiksen. Peneliti berupaya untuk menyajikan informasi sepadat mungkin mengenai karier politik Frederiksen, mulai dari masa-masa awalnya menjajaki dunia politik, masa-masanya menjabat di parlemen (*folketing*), kiprahnya dalam partai *Socialdemokratiet*, hingga menjadi seorang Perdana Menteri Denmark.

## **BAB III Kebijakan Imigrasi Denmark dan Krisis Pengungsi Suriah**

Bab III merupakan bagian dalam penelitian ini yang berperan dalam mengelaborasi informasi yang berkaitan dengan unit eksplanasi, yaitu kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah. Penjelasan bab ini tidak hanya terpaku pada kebijakan repatriasi yang ditetapkan Denmark pasca krisis pengungsi 2013-2015, namun juga mencoba melihat kebijakan imigrasi pada masa-masa sebelum krisis terjadi. Oleh karena itu, bab ini tidak hanya berfokus

pada masa pemerintahan Mette Frederiksen, tetapi juga pemimpin-pemimpin terdahulu Denmark. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum tentang gaya dan pola kepemimpinan Perdana Menteri Denmark. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan informasi tentang krisis pengungsi Suriah yang melanda Denmark, karena krisis tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ini.

#### **BAB IV Gaya Kepemimpinan Mette Frederiksen dalam Kebijakan Repatriasi Pengungsi Suriah di Denmark**

Bab IV adalah bagian pembuktian dalam penelitian ini. Bab ini akan dipenuhi dengan analisis yang peneliti lakukan terhadap gaya kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi Denmark terhadap pengungsi Suriah. Analisis yang diuraikan dalam bab ini merupakan hasil riset yang peneliti olah menggunakan konsep *predominant leader* yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann dalam *Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals*. Bab ini secara akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dicantumkan di bab I, sehingga pembaca bisa mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan Mette Frederiksen dalam kebijakan repatriasi tersebut.

#### **BAB V Penutup**

Bab V akan menjadi bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini meliputi kesimpulan atas seluruh pembahasan yang sudah disajikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan bagian krusial dalam penelitian ini, karena berisi rangkuman keseluruhan bagian penelitian secara singkat, padat, dan jelas.



Bab ini juga akan memuat saran dan rekomendasi yang peneliti tuliskan untuk pembaca dan peneliti lainnya, agar dapat mengisi kerumpangan dalam penelitian ini dengan merujuk pada literatur-literatur lain. Selain itu, bab ini juga akan mencantumkan daftar pustaka yang berisi seluruh referensi yang peneliti rujuk dan gunakan selama menyusun penelitian ini.

